

## Panglima TNI akan Sampaikan Teguran Komisi 1 DPR ke Dudung

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan akan menyampaikan teguran anggota Komisi 1 DPR Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman soal ketidakhadirannya dalam rapat perdana Yudo dengan DPR.

Sebelumnya Komisi 1 DPR meminta Yudo untuk menyampaikan kepada Jenderal Dudung agar memperbaiki cara komunikasinya.

"Ya nanti kita sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Yudo memastikan pesan Komisi 1 DPR itu akan disampaikan ke Dudung. Menurutnya hal itu merupakan perintah yang sudah pasti akan disampaikan.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," ucap Yudo.

Panglima menjelaskan bahwa saat ini Dudung sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Dudung sudah minta izin kepadanya untuk tidak bisa menghadiri rapat di DPR.

"Dan saya sudah membuat surat ke Komisi 1 tentang ketidakhadirannya Beliau. Karena kewenangannya kan ngirimnya, laporannya ke Panglima TNI. TNI membuat surat ke Komisi 1," kata Yudo.

Dalam rapat perdana Yudo sebagai Panglima TNI, Yudo didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto.

Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hadid memohon kepada Panglima TNI agar menyampaikan kepada Dudung untuk memperbaiki cara komunikasinya.

"Mohon disampaikan Pak Panglima kepada Pak KSAD untuk lain kali dapat memberikan komunikasi yang lebih baik," kata Meutya di ruang rapat.

Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Dave Laksono menyentil Dudung untuk menghormati Komisi 1 DPR apabila ingin lebih dihormati juga. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## IJTIMA ULAMA JAKARTA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mughaimin Iskandar (kanan) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis (2/2). PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema "Ulama Solid Menjaga Masa Depan Jakarta".

# Indeks Persepsi Korupsi RI Jeblok, Jokowi: Akan Dikoreksi dan Evaluasi

IPK tahun 2022 berada pada angka 34 poin. Capaian tersebut turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada di 38 poin. Ini yang terburuk sejak reformasi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.

Kepala Negara mengatakan, turunnya banyak IPK Indonesia makai akan melakukan koreksi maupun evaluasi bersama kabinet dan lembaga penegak hukum.

"Iya itu akan dikoreksi dan evaluasi kita bersama," kata Jokowi di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Diberitakan sebelumnya, Transparency Internasional

merilis hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran Transparency Internasional, IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.

IPK Indonesia 2022 yang turun hingga 4 poin, menjadi yang terburuk sejak era Reformasi.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengaku kaget saat diberi

tahu mengenai skor IPK itu. Saat itu, Pahala ditelepon oleh Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko.

"Jadi yang pertama saya ditelepon kemarin kaget setengah mati saya, kok cuma 34," kata Pahala saat menghadiri peluncuran IPK 2022 yang digelar TII, Selasa (31/1).

IPK tahun 2022 berada pada angka 34 poin. Capaian tersebut turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada di 38 poin.

Namun saat itu, ia mendapatkan penjelasan dari Wawan ada tiga indikator yang turun bebas sehingga menyebabkan IPK anjlok. Tiga indikator tersebut yakni:

1. PRS Internasional Country Risk Guide (korupsi dalam sistem politik, pembayaran khusus dan suap ekspor impor dan hubungan

mencurigakan antara politik dan pebisnis). Turun dari 48 menjadi 35.

2. IMD World Competitiveness Yearbook (suap dan

korupsi dalam sistem politik). Turun dari 44 menjadi 39.

3. PERC Asia Risk Guide. Turun dari 32 menjadi 29.

● han

## Pengacara Putri Candrawathi Tuding Isi Replik Jaksa Penuntut Umum Klise

JAKARTA (IM) - Pengacara Putri Candrawathi, Arman Hanis menuding replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) klise. Hal itu disampaikan Arman dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Tudingan itu disampaikan Tim pengacara terdakwa saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik yang disampaikan JPU, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Kamis (2/2).

"Setelah mendengar, membaca, dan meneliti replik penuntut umum yang setebal 28 halaman yang dibacakan pada hari Senin, 30 Januari 2023, tim penasihat hukum tak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti valid dan argumentasi hukum yang kokoh," ujar Arman Hanis.

Arman bahkan menyebut sebagian besar isi replik Jaksa tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi baru, dan tuduhan baru pada tim penasihat hukum. Hal itu dianggapnya sebagai langkah emosional, menyedihkan dan nyaris sia-sia.

Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, lanjutnya, semakin terlihat

pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan.

Meski begitu, Arman mengaku pihaknya tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal dilakukan penuntut umum itu.

"Replik yang diajukan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum seharusnya dibuat berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan. Namun, pada kenyataannya replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat," kata Arman membacakan dupliknya.

Menurut Arman, cara tersebut alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, malah menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya.

Terdakwa Putri Candrawathi bakal menjalani sidang putusan atau vonis pada Senin, 13 Februari 2023 mendatang. Sidangnyanya bersamaan dengan sidang vonis suaminya, Ferdy Sambo.

"Telah didengarkan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Tibalah majelis akan mengambil putusan yang akan kami bacakan pada hari Senin, 13 Februari 2023 mendatang," kata Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso di persidangan, Kamis (2/2). ● han

## Gus Yahya: Nahdliyin Bukan Hanya di PKB, Tapi Banyak Juga di Parlemen dan Pemerintah

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa nahdliyin bukan hanya ada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja. Tapi tersebar ke berbagai partai politik di parlemen maupun di pemerintahan.

"NU sekarang sudah banyak yang di parlemen, bukan hanya di PKB saja," kata Gus Yahya saat ngopi bareng bersama dengan pimred media nasional, di kantor PBNU Jakarta, Rabu (1/2).

"Walaupun, dikatakan bahwa NU ini PKB, PKB NU. Terang-terangan saja saya. Tapi nyantanya di luar PKB juga banyak," ujarnya.

Warga NU juga tersebar di berbagai instansi pemerintah. Semua itu pun mempunyai relasi yang baik dengan NU.

"Di dalam dalam pemerintahan juga banyak, pejabat yang NU itu semua polisi, di pengadilan semua ada dan semua ada dalam jaringan yang kita punya komunikasi

yang baik sekali," tuturnya.

Mantan Jubir Presiden RI ke 4 Abdurachman Wahid (Gus Dur) ini mengatakan, NU dapat memberikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa perlu menjadi pihak yang berkompetisi dalam politik. NU akan menggunakan saluran-saluran yang tidak menimbulkan akibat memposisikan NU sebagai kubu kekuasaan, kubu politik.

"Kita bisa melakukan upaya untuk ikut serta mempengaruhi agregasi politik melalui saluran saluran lain itu. Tapi sekali lagi tidak memicu benturan kekuasaan di publik itu harus dihindari," tuturnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan jika NU membuat artikulasi publik tentang masalah-masalah yang menyangkut politik, maka tujuannya harus pendidikan dan tidak boleh tujuan yang lain. "Kalau kita mengartikulasi publik harus untuk pendidikan tidak bisa selain itu," ujarnya. ● mei

## Rafael Granada Baay Ditunjuk Sebagai Komandan Paspampres

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali melakukan mutasi kepada sejumlah perwira tinggi TNI di tiga matra.

Setidaknya 84 perwira TNI dimutasi, salah satunya yang menduduki jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Kebijakan mutasi tertuang pada Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kep/114/1/2023 tertanggal 31 Januari 2023.

Dalam surat keputusan tersebut, Yudo juga mengangkat Brigjen TNI Rafael Granada Baay sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) menggantikan Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko.

Sementara Wahyu Hidayat Sudjatmiko dimutasi menjadi Dankopasgat. Arbituren Akademi Militer 1993 berpengalaman dalam Korps Barot

Merah Kopassus. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Aspotwil Kaskogabwilhan I.

Dalam Surat Keputusan Panglima TNI tersebut juga disebut Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Korps Marinir mendapatkan promosi menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL).

Diketahui, Gubernur Akademi Angkatan Laut merupakan jabatan Jenderal Bintang Dua yang sebelumnya dipegang oleh Laksamana Muda TNI Denih Hendrata. Sementara Denih Hendrata dirotasi menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KASAL).

Arbituren Akademi Angkatan Laut 1990 ini sebelumnya adalah Wakil Komandan Korps Marinir, Endi juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut. ● han

## Kejagung: Hasil Rampasan dan Lelang Aset Jiwasraya Mencapai Rp3,1 Triliun

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa sejak bulan September 2022 hingga Januari 2023, pihaknya telah melakukan pemulihan aset barang rampasan negara PT Asuransi Jiwasraya (persero) sebesar Rp3.110.042.396.973,91.

"Baik yang berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan," kata Kapuspemkum Kejagung Ketut Sumedana kepada awak media, Jakarta, Kamis (2/2).

Adapun uang triliunan itu diperoleh dari pemulihan aset di antaranya:

1. Tanah dan Bangunan senilai Rp79.815.957.844,00 (170 bidang tanah & bangunan yang telah laku terjual) dan (1.188 Barang Rampasan Negara berupa tanah/bangunan yang belum laku terjual dengan nilai Rp1.411.115.009.000)
2. Kendaraan senilai Rp8.108.893.000,00 (22 unit mobil dan 1 unit sepeda motor);
3. Reksa Dana senilai

Rp1.620.724.273.836,15 (90 produk Reksa Dana);

4. Efek senilai Rp1.370.159.402.675,89 (penjualan 3.240.480.400 lembar saham, waran, obligasi dan pencairan dana terkait efek);

5. Penjualan langsung senilai Rp26.020.000,00 (sepeda merk Mercedes Benz dan merk Paris 501);

6. Setoran nilai senilai Rp11.823.398.617,87 (uang rampasan);

7. Perhiasan, arloji, dan gitar listrik senilai Rp856.532.000,00;

8. Kapal Phinisi senilai Rp5.550.689.000,00;

9. Penjualan lelang aset GBU senilai Rp9.059.764.000,00 (Conveyor, Bangunan Mess, Room Power House, Kendaraan dan Alat Berat);

10. Penetapan Status Penggunaan (PSP) senilai Rp3.917.466.000,00 (4 unit kendaraan mobil).

Menurut Ketut, masih banyak barang rampasan kasus Jiwasraya yang perlu diselesaikan, sebagaimana upaya untuk mengoptimalkan PNB. ● han

## KASUS TABRAK MATI MAHASISWI DI CIANJUR Kopolnas Minta Propam Periksa Kopol D dari Mana Memperoleh Mobil Mewah Audi A6

JAKARTA (IM) - Kopolnas meminta Propam Polda Metro Jaya supaya menelusuri dari mana Kopol Dwi Yuniar Mukti Setyawan atau Kopol D memperoleh Audi A6, mobil yang menabrak mahasiswa Cianjur, Selvi Amelia hingga tewas. Kopolnas menilai Audi A6 kategori mobil mewah.

"Selain kasus selingkuh, Propam perlu juga memeriksa dari mana Kopol D memperoleh mobil Audi yang masuk kategori mewah," kata Komisioner Kopolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis (2/2).

Poengky mengaku tak ada masalah jika memang mobil tersebut didapatkan dari usaha yang sah. Namun,

menurutnya, seorang polisi tidak patut menunjukkan kehidupan mewah.

"Jika diperoleh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, misalnya dari warisan atau dari usaha yang sah, boleh saja. Meskipun demikian, tetap saja kurang pantas jika ada seorang anggota kepolisian atau keluarganya berani berpenampilan mewah," ujarnya.

Lebih lanjut Kopolnas tetap mengimbau seluruh polisi untuk menunjukkan kehidupan yang sederhana.

"Sebagai abdi negara, semua anggota Polri dan keluarganya tetap harus menunjukkan gaya hidup sederhana. Ini bagian dari Reformasi Kultural Polri," katanya.

Sebelumnya, Polres Cianjur mengungkapkan fakta baru terkait kecelakaan yang menewaskan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat, Selvi Amelia Nuraeni. Ternyata mobil Audi A6 yang dipakai dan menabrak mahasiswa Cianjur itu bukan milik Kopol D.

"Setelah kami dalam dan dikonfirmasi ke pemiliknya, mobil ini milik perorangan atas inisial J," ujar Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, dilansir detikJabar, Rabu (1/2).

Menurut Doni, mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Pemilik asli mobil itu merupakan warga Jakarta, dan tidak mengetahui mobil tersebut berada di Cianjur sehingga terlibat kecelakaan. ● mei

FOTO: ANT



## AKSI TOLAK MASA JABATAN KADES 9 TAHUN

Warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Banyuwangi mem-bentangkan spanduk bertuliskan Menolak Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun pada aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/2). Mereka menyatakan bahwa wacana perubahan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam menjadi sembilan tahun dalam satu periode akan membuka peluang korupsi yang lebih besar serta bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan.

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pembubaran Nomor 01, tertanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dihadapan DEWI KRISTIANA, S.H., M.Kn, Notaris di kabupaten Bandung Barat, Bahwa PT. FISSLERINDO JAYA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Pusat telah dibubarkan. Segala tuntutan/talihan dan keberatan terhadap Perseroan, agar menghubungi Direksi dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, disertai dokumen asli dan lengkap pada alamat: Komplek Duta Merlin Blok C Nomor 41-42, Jalan Gajah mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat. Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Perseroan Terbatas  
Jakarta, 03 Februari 2023  
Likuidator Perseroan

**PENGUMUMAN**  
Untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 Ayat 2 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT LUMI MEDIKA SEJAHTERA, berkedudukan di Kota Malang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan.  
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang memiliki keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dengan ditunjukkan kepada: PT LUMI MEDIKA SEJAHTERA Jalan Simping Borobudur Nomor 71, Kota Malang  
Malang, 3 Februari 2023  
Direksi Perseroan